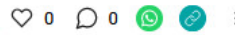
	<b>News Title</b> : Bappebti Optimistis Bursa Kripto Indonesia Bisa Diluncurkan Juni 2023	
	<b>Media Name</b> : kumparan.com	<b>Journalist</b> : Istimewa
	<b>Publish Date</b> : 20 January 2023	<b>Tonality</b> : Positive
	<b>News Page</b> :	<b>News Value</b> : 0
	<b>Resources</b> : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	<b>Ads Value</b> : 0
	<b>Section/Rubrication</b> : Bisnis	<b>Topic</b> : Raker Bappebti

## Bappebti Optimistis Bursa Kripto Indonesia Bisa Diluncurkan Juni 2023

kumparanBISNIS

20 Januari 2023 12:53 · waktu baca 3 menit



Ilustrasi aset kripto. Foto: Shutterstock

Bursa **kripto** Indonesia dilaporkan akan segera hadir. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) untuk meluncurkan bursa kripto sebelum Juni 2023.

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko melihat hal tersebut realistis untuk diwujudkan pada tahun ini. Pasalnya, mereka sudah menetapkan sejumlah kriteria sampai Desember 2022 lalu.

"Kami upayakan sampai Juni, kami upayakan dengan keras," ujar Didid dalam Penutupan Raker Bappebti di Auditorium Bappebti, Jumat (20/1).

Dalam membuat bursa kripto, kata dia, harus ada tiga perusahaan yang terlibat. Adapun sampai saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang ingin mendaftar di bursa kripto Indonesia.

Bappebti juga telah melirik dan melihat perusahaan yang berpotensi untuk bergabung ke dalam bursa kripto Indonesia. Namun, Didid belum dapat mengungkapkan perusahaan mana saja yang ingin masuk ke dalam bursa.

"Saya belum bisa kasih tahu ya. Itu nanti terkait dengan masalah integritas. Jangan sampai ini sudah ditunjuk, oh tidak, tidak, belum ada satu pun yang ditunjuk, belum ada satu pun yang kira-kira akan pasti, tapi kami sudah punya beberapa pandangan," tambahnya.



Pit. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko di Auditorium Bappebti, Jumat (20/1/2023). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Menurut Didid, Bappebti tidak hanya membentuk bursa kripto Indonesia melainkan suatu ekosistem dengan kliring berjangka hingga *depository*-nya. Untuk itu, ketiga perusahaan ini tidak boleh terafiliasi.

"Strategi kami, kami akan membentuk bola kira-kira perusahaan yang berpotensi akan kami lakukan katakanlah pembinaan sejak awal," jelas Didid.



### Progress Bursa Kripto Indonesia

Ia menambahkan bahwa pembuatan bursa kripto Indonesia masih berada pada *stage* pertama dari tiga *stage* yang ada. Ia juga tidak menampik bahwa Bappebti telah menyiapkan sejumlah standar dan indikator yang harus dipenuhi perusahaan.

Apabila *stage* pertama telah terpenuhi, maka *stage* kedua adalah perusahaan harus menjalankan operasinya secara *shadow* dengan dipantau oleh Bappebti. "Artinya yang tadi kriteria teknis yang dipenuhi itu jalan atau tidak," pungkasnya.

Selanjutnya, *stage* ketiga adalah Bappebti akan menyusun jajaran direksi. Untuk itu, pihaknya harus menyelesaikan *stage* pertama terlebih dulu. "Yang pertama ini dulu dari sisi perusahaan harus siap, jadi memang *stage* pertama yang paling berat," tandas dia.

Sebelumnya, Mendag Zulhas menegaskan pembuatan bursa kripto harus diselesaikan sebelum UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) berlaku atau pengawasan kripto diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bursa kripto juga mudah-mudahan sebelum Juni, launching bagaimana pun itu diperlukan," kata Zulhas pada Pembukaan Rapat Kerja Bappebti, di Kementerian Perdagangan, Kamis (19/1).

Zulhas mengatakan pemerintah diberikan waktu enam bulan untuk menyusun Peraturan Pemerintah (Permen) berkaitan dengan transisi pengawasan aset kripto ke OJK. Sebab, pembentukan bursa akan memperjelas aturan terkait aset kripto.

Ia optimistis pertumbuhan kripto akan tumbuh seiring pemahaman masyarakat terhadap aset tersebut meningkat. "Tentu kita harus memperkuat aturan aturan Pak Didid, agar nanti masyarakat kita ini betul betul kalau mereka ikut pertumbuhan kripto ini kan cukup besar 2022 saya dengar itu hampir Rp 800 triliun tapi tahun lalu menurun menjadi Rp 200 sekian triliun jadi harus punya aturan dan pengawasan yang kuat jangan sampai nanti masyarakat kita ini tahu tahu uangnya hilang," tegas Zulhas.